

Dokumen

Sambungan hal 1

serta telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021. "Lalu telah melaporkan pajak terakhir pada 20 Juni 2021 dan keterangan berbandan sehat jasmani dan rohani sesuai keterangan dokter dengan hasil PCR negatif," ujarnya.

Komis I DPR RI telah memutuskan jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima Jenderal Andika Perkasa, akan dilakukan pada Sabtu mendatang. Keputusan itu didapat setelah Komisi I melakukan rapat in-

ternal penentuan jadwal.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyebut untuk rapat paripurna akan dilaksanakan pada Senin yang menghardirkan Jenderal Andika untuk dilantik. (Ant)-d

Medsos

Sambungan hal 1

bahwa apa yang berusaha kita sampaikan, medsos ini bisa diterima dan dianggap memenuhi syarat medsos yang baik," tutur Kepala Diskominfo DIY Ir Rony Primanto Hari MT kepada KR, Jumat (5/11).

yang bisa diterima masyarakat," paparnya.

Menurut Rony, dengan membuat konten-konten berkualitas ini sekaligus dapat mendidik masyarakat supaya dapat membuka konten-konten Pemda, daripada mengakses konten yang dibuat pihak lain yang diragukan kebenarannya atau hoaks. Hal ini sebagai upaya membuka konten-konten hoaks dengan membuat konten berkualitas, menarik dan mencerahkan masyarakat.

Pemerintah Daerah DIY," ujar Imam Pratanadi.

Menkominfo Johny G Plate mengungkapkan, berbagai capaian penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak lepas dari peranan komunikasi publik. Tentunya Humas Kementerian, Lembaga Pemerintahan dan Perguruan Tinggi mengambil peran penting dalam hal ini. Situasi pandemi tentu menjadi tantangan tersendiri terutama bagi kinerja Humas Pemerintahan. Apabila melihat perjalanan pandemi Covid-19 di Indonesia, dapat dikatakan kinerja humas dituntut untuk terus adaptif dan responsif terhadap perkembangan. Sangat diperlukan kebijakan gas dan rem seperti arahan Presiden Joko Widodo.

Rony mengatakan, konten medsos yang dibuat Pemda DIY ini kini lebih mengarah ke gaya milenial karena memang banyak diakses kaum milenial. Dengan prestasi ini, diharapkan menjadi pemacu pengelola konten Pemda DIY lainnya agar menghasilkan konten-konten yang baik, berkualitas, bisa diterima dan memang dibutuhkan masyarakat. Pemda DIY mempunyai banyak saluran untuk menyampaikan informasi, publikasi maupun sosialisasi terkait Pemda. Namun yang menjadi pilihan tepat di era saat ini karena hampir semuanya mempunyai akun medsos.

Ditemui usai menerima penghargaan, Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY Imam Pratanadi mengatakan, kemenangan medsos milik Pemda DIY ini tidak lepas dari kerja sama yang selama ini terjalin secara intens antara Humas Biro UHP Setda DIY dengan Diskominfo DIY. Karena masing-masing pihak berperan aktif sesuai porsinya untuk saling mengisi dan bekerja sama, sehingga menghasilkan produk-produk yang kreatif.

"Komunikasi Publik dan Humas Pemerintah menjadi instrumen yang vital untuk mendesain informasi kebijakan serta program-program Pemerintah dalam menangani Covid-19. Harus secara cepat dan efektif dari sisi substansi data dan informasi yang faktual menjadi semakin esensial untuk menjaga kepercayaan publik dalam upaya komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah," ujar Johny. (Ira/Ria)-f

"Pemda DIY harus bisa bersaing dengan konten-konten yang lain agar tetap dibuka para pengguna medsos atau dunia maya. Dengan demikian informasi yang dihasilkan bisa sampai kepada masyarakat dan lebih efektif. Sekali lagi kami mengajak pengelola medsos di lingkungan Pemda DIY bisa membuat konten berkualitas

Peparnas

Sambungan hal 1

Dengan kerja keras serta dukungan seluruh masyarakat, Papua telah berhasil menyiapkan venue tempat pertandingan dan sarana pendukung sesuai dengan standar pertandingan level nasional. Atas keberhasilan inilah, pemerintah pusat sangat mengapresiasi gelaran olahraga yang diselenggarakan di Papua ini.

akan menutupnya. Ini baru terjadi di tanah Papua," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Besar Peparnas yang sekaligus juga Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai Peparnas adalah sebuah panggung kesetaraan dan ajang untuk mengharumkan nama bangsa bagi penyandang disabilitas. "Peparnas bukan hanya pelengkap PON Papua saja. Peparnas adalah wadah kompetisi olahraga yang sama, sehingga kami mempersiapkan Peparnas dengan hati yang tulus," ujarnya.

paralympian dari 33 provinsi di Indonesia akan bertanding untuk bersaing meraih prestasi. Dalam kesempatan tersebut dirinya juga mengapresiasi komitmen pemerintah saat ini yang benar-benar memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Atas kerja keras dan komitmen itulah, Ma'ruf mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta dirinya untuk membuka Peparnas ini dan Jokowi sendiri yang nanti akan menutupnya. "Pada PON yang lalu Presiden membuka acara dan saya yang menutup. Sebaliknya pada acara ini saya yang membuka dan Presiden yang nanti

Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun mengatakan, sekitar 1.985

Sementara itu, dalam pembukaan tadi malam, kontingen DIY diwakili oleh 6 atlet yakni, Ernawati (para atletik), Untung Subagya (para angkat berat), Arya Sadewa (para bulutangkis), Desta Ariyani (para panahan), Arifin Risman (tenis kursi roda), dan Iksan Nugraha (para tenis meja). Dalam defile, Arya Sadewa dan Desta Ariyani secara khusus mengenakan pakaian tradisional DIY. (Hit)-f

Komunikasi

Sambungan hal 1

bemakna khas (unik) terkait dengan disposisi biologisnya, perkembangan sains, maupun teknologi.

pasti bahwa pada tiap komunikasi terkandung pemikiran dan makna, dan terus berlanjut hingga terwujud suatu hasil yang bersifat sosial. Dalam konteks sosial demikian, anggota jaringan memperoleh legitimasi dalam batas-batas harapan, kerahasiaan, dan kesetiaan terhadap jaringannya.

Pembenaran oleh warga masyarakat pun didesain melalui pembatasan ruang, waktu, dan rongga jiwa, sehingga sulit untuk perenungan secara jernih.

Interaksi antarberbagai subsistem, berlangsung sebagai autopoietis. Artinya, ada kapasitas untuk memproduksi, menopang, dan memperbarui kesadaran, kebebasan, dan komunikasi bagi pemenuhan kebutuhan sendiri. Kapasitas ini membutuhkan pengaturan, komposisi, dan konservasi batas-batasnya; yaitu, pemeliharaan bentuk tertentu meskipun di dalam ataupun di luar jaringan.

Sudah tentu, mereka yang berada di luar jaringan, bisa terkena implikasi negatif dari komunikasi autopoietik tersebut. Fritjof Capra (2003) mengingatkan, bahwa implikasi-implikasi komunikasi autopoietik tersebut dapat bermakna ganda. Di satu pihak, dapat dihasilkan ide-ide baru dalam makna tertentu, di pihak lain dapat dihasilkan kaidah ataupun norma yang eksis sebagai perilaku maupun struktur sosial.

Ambil contoh. Untuk memahami foto dan rangkaian kata sebagaimana dipasang di balihok berukuran besar, diperlukan pemahaman atas konteks politik, khususnya Pilpres 2024.

Konsep autopoietis awalnya dikenal dalam bidang ilmu biologi. Oleh tokohnya, Varela dan Maturana (1980) dijelaskan bagaimana sistem bekerja di dalam tubuh makhluk hidup. Ditunjukkan bahwa sistem selalu bersifat terbuka dan sekaligus tertutup.

Penjelasan teoretis-akademis di atas, ditampilkan sebagai upaya untuk memahamkan bahwa kita sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara, sangat mungkin berada dalam komunikasi autopoietik itu. Mungkin ada di antara kita yang berada dalam jaringan yang berposisi sebagai penguasa atas berbagai media. Sehingga memiliki keleluasaan mendesain pesan-pesan sedemikian rupa dan menampilkannya terus-menerus di berbagai media. Tentu, bukan iseng. Bukan tanpa makna. Melainkan sarat kepentingan. Pesan-pesan didesain sedemikian artifisial. Seolah pasti benar.

Pemahaman tersebut tidak bisa direduksi ke dalam aktivitas intelektual-akademik, ataupun sosiologi hukum murni. Mesti dipahami, bahwa ada upaya untuk merangkai pesan-pesan politik agar masyarakat percaya kepadanya. Di situ, unsur rasa, terkesan lebih emosional, bahkan melampaui makna maupun akal sehat.

Tokoh teori sistem, Niklas Luhmann (1990), menyatakan bahwa sistem-sistem sosial sebagai jaringan sosial, di dalamnya selalu terjadi komunikasi melalui cara khusus sebagai reproduksi autopoietik mereka. Unsur-unsurnya adalah komunikasi diproduksi berulang-ulang dan direproduksi sekian banyak dan berulang-ulang pula oleh suatu jaringan komunikasi.

Siapa pun yang masih memiliki akal sehat, tentu berharap agar pada komunikasi autopoietik manapun dan oleh siapa pun, senantiasa ada kejujuran. Antara ketertutupan dan keterbukaan berada dalam kesamaan. Pendek kata, jangan ada kebohongan publik.

Autopoietik itu tidak dapat dikenali sekama oleh mereka yang berada di luar jaringan tersebut. Ketertutupan jaringan komunikasi bisa terjadi secara mandiri, otomatis, ataupun karena desain. Satu hal

Agar publik tidak kecewa di masa mendatang, dinasihatkan oleh Fritjof Capra (2003), agar tindakan apapun dilakukan senantiasa memperhatikan aspek kognitif, penuh kesadaran. Jangan kacaukan antara otonomi sistem sosial dengan independensi. (Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum UGM)-d

Gerakan Pasar Bebas Sampah di Temanggung

TEMANGGUNG (KR) - Pemkab Temanggung melakukan gerakan pasar tradisional bebas sampah. Pencanaan tersebut digelar di Pasar Wage Adiwirang Ngadirejo, Jumat (5/11).

maupun pembeli, karena pasar itu sumber sampah terbesar di masyarakat. Harapannya kalau semua warga pasar mempunyai kesadaran untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan memilih sampah, nanti pasar ini benar-benar bebas dari sampah.

Pencanaan dilakukan Bupati Temanggung Al Khadziq dan seluruh pedagang serta warga sekitar pasar terbesar di Temanggung bagian utara itu. Al Khadziq mengatakan, gerakan pasar bebas sampah adalah kampanye mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Entargo Yutri Wardono mengatakan, gerakan Temanggung bersih untuk menuju target Temanggung bebas sampah.

Selain itu, juga kampanye kepada seluruh warga pasar agar sampah bisa dikelola dengan cara 3R, yakni *reduce* (kurangi), *reuse* (gunakan kembali), dan *recycle* (daur ulang).

Dikatakan, perencanaan tiga pasar bebas, yaitu Pasar Temanggung, Pasar Parakan dan Pasar Ngadirejo. "Untuk kegiatan di pasar-pasar lainnya akan dilaksanakan di beberapa waktu kemudian," katanya.

"Intinya sampah dipilah sesuai jenisnya. Sampah organik dikembalikan ke alam, sampah yang bisa didaur ulang dilakukan daur ulang dan sampah esidu dibuang ke tempat sampah," kata Al Khadziq.

Gerakan bebas sampah selain di pasar tradisional juga di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kemudian nanti pada Minggu (7/11) semua masyarakat di desa maupun di kota ikut terlibat dalam gerakan Temanggung bersih," katanya. (Osy)-d

Sekolah

Sambungan hal 1

Pihaknya berharap, penyebaran kasus Covid-19 dapat dikendalikan, sehingga tidak ada penutupan sekolah di kapanewon lainnya. Meski saat ini penularan telah menyebar ke kapanewon di luar Sedayu. "Saat ini, di luar siswa SD, hampir semua siswa SMP, SMA dan SMK divaksin. Saat ini mereka OTG, dan semoga bisa kembali," ujar Didik.

tersebut, 28 orang berasal dari Kapanewon Sedayu, 9 orang warga Kapanewon Kasihan, enam warga Pajangan dan satu warga Bambanglipuro dan Kapanewon Sewon.

Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, dr Tri Wijaya mengemukakan, penyebaran kasus Covid-19 ke sekolah di Kapanewon Sedayu berawal dari munculnya klaster takziah di Kapanewon Sedayu. Penyebaran ini menyebar ke sejumlah kapanewon lainnya. "Ini yang harus kita waspadai," ujarnya.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Disdikpora DIY dan disepakati sekolah tutup sementara. Kemudian kami gerak cepat yang dilakukan oleh teman-teman dinas dan Puskesmas Sedayu untuk melakukan tracing yang kontak erat dan sudah menemukan suspeknya beberapa hari yang lalu," jelasnya.

Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul yang juga Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo mengemukakan, penambahan kasus pasien Covid-19 dari klaster takziah di Kapanewon Sedayu Bantul makin sulit dibendung. Imbas dari klaster itu kini Covid-19 juga mendera warga di luar Bantul. Sementara tiga kapanewon di Bantul sudah terbebas dari Covid-19 yakni, Pleret, Imogiri dan Dlingo.

Dengan terjadinya lonjakan Covid-19 pihaknya kini mengencarkan pelacakan kemudian dilakukan testing swab PCR. Selain itu pematanaan prokes tidak boleh kendur. "Satpol PP Bantul kami minta mengedukasi dan monitoring terkait penerapan prokes khusus di sekolah-sekolah yang menggelar PTM," jelas Joko.

Warga Bantul yang terpapar klaster takziah jumlahnya mencapai 47 orang. Dari angka

Oleh karena itu, pihaknya minta kepada semua pihak tetap fokus dan menjaga prokes. Ketika komitmen selalu menjaga prokes dilaksanakan Covid-19 bisa ditanggulangi. "Beberapa kapanewon di Bantul bisa bebas dari penderita Covid-19 di antaranya, Imogiri, Dlingo dan Pleret," ujarnya. Sedangkan di Kapanewon Banguntapan dan Sewon terus mengalami penurunan jumlah kasusnya. (Jon/Roy)-d

Kemenkumham

Sambungan hal 1

Sampai saat ini, lima petugas tersebut masih dimintai keterangannya di Kanwil Kemenkumham DIY. "Kita gali dulu sejauh mana peran mereka dalam dugaan terjadinya tindak kekerasan di Lapas Narkotika," kata Budi.

sehari-hari memiliki posisi sebagai petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan beberapa lainnya sebagai petugas regu pengamanan lapas.

Keputusan memeriksa dan mencopot jabatan sementara lima petugas tersebut, jelasnya, mengacu pada informasi yang dikumpulkan Tim Investigasi Kanwil Kemenkumham DIY di lapas yang berlokasi di Pakem Kabupaten Sleman itu.

Mengenai sejauh mana tindakan berlebihan mereka, ia belum bisa membeberkan karena tim pemeriksa masih akan menggali informasi lebih mendalam.

Mereka terindikasi mengabaikan kedisiplinan secara berlebihan terhadap para warga binaan saat masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Blok Edelweis Lapas.

"Harus objektif. ini bukan masalah yang biasa. Ini melanggar HAM kalau memang terjadi," tutur Gusti Ayu. Seperti diberitakan sebe-



Prakiraan Cuaca Sabtu, 6 November 2021

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	21-31	70-95
Wates	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-30	70-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95

☀ Cerah ☁ Berawan 🌪 Udar Kabur 🌧 Hujan Lokal 🌧 Hujan Petir

Grafis : Arko

Menilik Arus Informasi Publik Melalui Perspektif Sistem Komunikasi



***Dwi Pela Agustina, S.I.Kom., M.A**
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

Pandemi Covid 19 memang telah banyak mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang tak terelakkan adalah sistem komunikasi. Sebagai sub sistem dari sistem sosial, sistem komunikasi dapat masuk ke berbagai sistem lainnya, seperti sistem pendidikan, kebudayaan dan pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba melihat sistem komunikasi dalam sistem pemerintahan. Terutama terkait dengan kebijakan

pemerintah yang cenderung tidak terstruktur dalam mengirimkan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Dalam hal ini yang ingin saya soroti adalah mengenai kebijakan syarat perjalanan domestik bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Informasi yang tidak serentak dan tidak terpusat menjadikan publik kebingungan dengan aturan tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan dengan syarat kewajiban tes Covid 19 bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Menjadi kebiasaan lazim di Indonesia bahwa informasi lebih cepat menyebar di media massa dan media sosial. Sayangnya, hal ini tak dibarengi dengan aliran informasi kepada pihak transportasi seperti terminal, stasiun dan bandara yang

dinilai lambat. Terutama bagi pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara yang melibatkan pihak bandara dan maskapai penerbangan. Beberapa waktu lalu rekan sejawat saya melakukan penerbangan dengan membawa batita di mana dalam aturan yang beredar bahwa anak di bawah 12 tahun sudah dapat melakukan peerbangan dan wajib melakukan tes covid. Namun apakah bayi juga diwajibkan untuk tes covid (antigen dan PCR) hal ini tidak disampaikan secara detail sehingga saat melakukan pengecekan pihak bandara dan maskapai melarang batita tersebut terbang karena tidak memiliki hasil tes covid. Hal ini tentu saja karena kesalahan atau miss persepsi yang ditangkap oleh publik ketika informasi yang beredar tidak diberitahu secara lengkap.



Kemudian peraturan yang memang kerap kali berubah-ubah ini pun membuat semua pihak kebingungan. Tidak hanya publik yang menggunakan jasa penerbangan akan tetapi mereka yang juga berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada 1 November 2021 lalu, peraturan Kemendagri terkait pelaku perjalanan domestik kembali berubah terkait syarat penerbangan, media massa pun turut menyebarluaskan informasi. Bahkan akun media sosial milik tokoh dan public figur pun turut mengunggah informasi tersebut. Namun sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan penyebaran

informasi yang sama kepada pihak terkait seperti pihak maskapai dan bandara sehingga meskipun aturan berubah, dan informasi beredar di masyarakat namun pihak terkait masih mengikuti SOP yang sebelumnya. Dalam undang-undang no 14 tahun 2008 disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu disebutkan pula bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat. Dalam kasus ini, seyogyanya pemerintah ada baiknya melakukan koordinasi yang jelas kepada pihak terkait sebelum informasi disebarluaskan kepada publik. Sementara dalam perspektif

sistem komunikasi Indonesia, sistem komunikasi merupakan satu kesatuan atau susunan kompleks elemen-elemen sistem komunikasi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Elemen-elemen tersebut tidak dapat terpisahkan dengan berbagai faktor yang mengikatnya yakni kondisi politik, sosial dan budaya Indonesia. Sehingga dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pemerintah harus memperhatikan beragam aspek, salah satunya adalah opini publik yang akan muncul, karenanya pemerintah diharapkan dapat menginformasikan kebijakan ketika semua elemen yang berkaitan sudah siap menjalankan kebijakan tersebut untuk kemudian dapat disebarluaskan kepada publik melalui media massa. (*)